

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pemerintah Daerah yang kepemimpinannya menjalankan praktik politik dinasti pada tahun 2013-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dari populasi tersebut, selanjutnya sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria yang telah disebutkan pada bab tiga. Sampel penelitian terdiri dari 95 sampel utama yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang terindikasi menjalankan praktik politik dinasti tahun 2013-2015, dan 95 sampel pembanding yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang tidak terindikasi menjalankan praktik politik dinasti tahun 2013-2015. Berikut perincian proses pengambilan sampel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Ringkasan Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Kabupaten/ Kota yang terindikasi menjalankan politik dinasti TA 2013-2015.	99
Kabupaten/ Kota yang skor kinerjanya tidak dimuat dalam <i>website</i> Kementerian Dalam Negeri.	(4)
Jumlah Sampel Terpilih	95
Kabupaten/ Kota yang menjadi sampel pembanding (<i>matched sampling</i>).	95
Jumlah Sampel Terpilih dan Diolah	190

Sumber: hasil pengolahan data 2019

B. Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Uji analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai jumlah data, nilai maksimum dan minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai simpangan baku (*standart deviation*) untuk variabel dependen, variabel independen, dan variabel pemoderasi. Hasil uji statistik dekriptif secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
AK	190	1	5	4,13	0,984
KD	190	0,0173	0,5612	0,127850	0,1028976
KP	190	0,0000	0,8756	0,584208	0,1630497
EK	190	0,4070	33,6868	1,467794	2,4160462
PD	190	0	1	0,50	0,501
SPI	190	2	20	7,83	3,3361
KK	190	0,9628	3,4552	2,823496	0,4782933
Valid N	190				

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Tabel 4.2 menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Tabel 4.2 di atas menunjukkan terdapat 190 sampel yang digunakan dalam penelitian. Rata-rata akuntabilitas keuangan pemerintah daerah adalah 4,13. Hal ini menunjukkan tingkat perolehan opini audit yang baik karena didominasi oleh opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas). Standar deviasi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 0,984. Dengan 5 sebagai nilai tertinggi dan 1 sebagai nilai terendah.

Rata-rata kemandirian daerah adalah 0,127850 atau sebesar 12% dan standar deviasi 0,1028976. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan jumlah PAD dalam total pendapatan suatu pemerintah daerah masih tergolong kecil sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2013-2015 masih rendah. Daerah yang memiliki kemandirian daerah paling rendah adalah Kota Pagar Alam tahun 2014 dengan rasio kemandirian daerah sebesar 0,0173, dan daerah yang memiliki kemandirian daerah paling tinggi adalah Kota Bima tahun 2014 dengan rasio kemandirian daerah sebesar 0,5612.

Variabel ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai rata-rata 0,584208 atau sebesar 58% dan standar deviasi 0,1630497. Nilai rata-rata 58% menunjukkan jumlah DAU dan DAK dalam total pendapatan suatu pemerintah daerah tergolong tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi. Daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat paling rendah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dengan rasio ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 0,0000 dan daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat paling tinggi adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2013 dengan rasio ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 0,8756.

Variabel efektivitas keuangan memiliki rata-rata 1,467794 atau 146% dan standar deviasi 2,4160462. Rata-rata rasio efektivitas keuangan sebesar 146% menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan

daerah tergolong sangat efektif ($> 100\%$). Daerah yang memiliki efektivitas keuangan paling rendah adalah Kota Pagar Alam tahun 2014 dengan rasio efektivitas sebesar 0,4070 dan daerah yang memiliki efektivitas keuangan paling tinggi adalah Kota Bima tahun 2014 dengan rasio efektivitas sebesar 33,6868.

Variabel politik dinasti yang diproksikan dengan variabel *dummy* memiliki nilai minimum 0 untuk daerah yang tidak terindikasi politik dinasti dan nilai maksimum 1 untuk daerah yang terindikasi politik dinasti. Variabel politik dinasti memiliki rata-rata 0,50 dan standar deviasi sebesar 0,501. Variabel jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal memiliki rata-rata 7,83 dan nilai standar deviasi sebesar 3,361. Jumlah temuan pelanggaran sistem pengendalian internal terendah adalah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pacitan tahun 2013 dengan jumlah 2 temuan dan jumlah temuan pelanggaran sistem pengendalian internal terbesar adalah Kota Manado tahun 2013 dengan jumlah 20 temuan.

Variabel kinerja memiliki rata-rata sebesar 2,823496 dan standar deviasi sebesar 0,4782933. Rata-rata skor kinerja 2,823496 mengindikasikan kinerja pemerintah daerah yang sudah bagus karena masuk dalam kategori tinggi (skor 2–3). Pemerintah daerah yang memiliki skor kinerja terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2013 dengan skor kinerja 0,9628 dan pemerintah daerah yang memiliki skor kinerja tertinggi adalah Kabupaten Pinrang tahun 2015 dengan skor kinerja 3,4552.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan uji asumsi klasik pada data agar menghasilkan model regresi yang tidak bias karena tidak semua data regresi dapat diolah. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi secara normal, dan terbebas dari gejala autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji asumsi klasik dari data yang digunakan dalam penelitian:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Pengujian normalitas residual data dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test (K-S)* dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*, yang mana residual data dapat dikatakan berdistribusi normal jika tingkat signifikansi $> 0,05$. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Uji Normalitas Persamaan 1

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	Nilai Sig	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,183	Residual berdistribusi normal

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji normalitas untuk model persamaan 1 pada tabel 4.3 menunjukkan hasil 0,183, artinya nilai signifikansi $0,183 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi residual data memenuhi syarat uji normalitas, sehingga residual data untuk model persamaan 1 dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 4.4
Uji Normalitas Persamaan 2

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	Nilai Sig	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,318	Residual berdistribusi normal

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji normalitas untuk model persamaan 2 pada tabel 4.4 menunjukkan hasil 0,318, artinya nilai signifikansi $0,318 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi residual data memenuhi syarat uji normalitas, sehingga residual data untuk model persamaan 2 dikatakan berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi yaitu dengan pengujian *Durbin-Watson* (Uji D-W). Ketika angka D-W berada diantara -2 dan +2, artinya tidak terdapat autokorelasi dalam

persamaan regresi (Santoso, 2010). Tabel berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi masing-masing persamaan.

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi Persamaan 1

Model Summary^b		
Durbin-Watson	1,734	Terbebas Autokorelasi

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji autokorelasi untuk model persamaan 1 menunjukkan nilai Durbin-Watson 1,734. Artinya nilai Durbin-Watson 1,734 memenuhi syarat persamaan regresi terbebas dari autokorelasi karena berada diantara nilai -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan 1 terbebas dari autokorelasi.

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi Persamaan 2

Model Summary^b		
Durbin-Watson	1,617	Terbebas Autokorelasi

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji autokorelasi untuk model persamaan 1 menunjukkan nilai Durbin-Watson 1,617. Artinya nilai Durbin-Watson 1,617 memenuhi syarat persamaan regresi terbebas dari autokorelasi karena berada diantara nilai -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan 2 terbebas dari autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah dalam suatu model regresi terdapat interkorelasi atau kolinieritas antar variabel bebasnya (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Model

regresi dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Tabel berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas setiap variabel di dalam masing-masing persamaan.

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas Persamaan 1

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Kemandirian Daerah	0,576	1,736
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,616	1,624
Efektivitas Keuangan	0,838	1,193
Politik Dinasti	0,884	1,131
Jumlah Pelanggaran SPI	0,813	1,230
Kinerja	0,869	1,150

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji multikolinearitas untuk model persamaan 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi syarat terbebas dari multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model persamaan 1 terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas Persamaan 2

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Kemandirian Daerah	0,019	52,737
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,364	2,750
Efektivitas Keuangan	0,835	1,198
Politik Dinasti	0,028	35,617
Jumlah Pelanggaran SPI	0,797	1,255
KK*KD	0,018	54,429
KK*KP	0,419	2,388
KK*PD	0,028	35,744

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Suatu model regresi dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dalam model persamaan 2, beberapa variabel, seperti kemandirian daerah, politik dinasti, serta variabel interaksi KK*KD dan variabel interaksi KK*PD memiliki nilai VIF > 10 dan nilai *Tolerance* < 0,1 sehingga dinyatakan mengandung multikolinearitas.

Menurut Gujarati dan Porter (2012), terdapat dua pilihan dalam mengatasi masalah multikolinearitas: (1) tidak melakukan apapun/dibiarkan saja (*do nothing*), dan (2) menggunakan aturan tertentu (*rule of thumb*). Gujarati dan Porter (2012) menyatakan bahwa, menurut paradigma *do nothing*, multikolinearitas merupakan kehendak Tuhan dan bukan suatu permasalahan teknik statistika. Selanjutnya, paradigma *rule of thumb* menyatakan bahwa jika terjadi permasalahan multikolinearitas serius, maka dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti apriori informasi, menggabungkan data *cross-section* dan data *time series*, mengeluarkan salah satu atau lebih variabel independen yang memiliki korelasi tinggi, serta mentransformasikan data dalam bentuk logaritma natural atau *first difference*. Paradigma *do nothing* sejalan dengan argumen Hartman dan Moers (1999) dalam Hartono (2016), yang menyatakan bahwa multikolinearitas tidak terjadi karena koefisien dari interaksi tidak sensitif terhadap perubahan-perubahan dari titik awal skala (misalnya ditransformasikan untuk ditengahkan

berdasarkan nilai rata-ratanya), sehingga multikolinearitas tidak menjadi masalah ketika menerapkan analisis regresi moderasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan paradigma *do nothing*, sehingga gejala multikolinearitas akan diabaikan saja. Hal ini disebabkan karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data berbentuk rasio, sehingga dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat apabila melakukan transformasi pada data sampel.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dalam suatu model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Tabel berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas setiap variabel dalam masing-masing persamaan yang didasarkan pada nilai signifikansi dengan menggunakan Uji *Spearman's rho*. Uji *Spearman's rho* merupakan cara lain yang legal dan dapat dilakukan untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi ketika uji gletser menunjukkan hasil adanya gejala heteroskedastisitas. Karena hasil uji gletser menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, penulis memutuskan untuk menggunakan Uji *Spearman's rho* untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam persamaan regresi.

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1

Correlations	
Kemandirian Daerah	0,930
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,838
Efektivitas Keuangan	0,352
Politik Dinasti	0,861
Jumlah Pelanggaran SPI	0,606
Kinerja	0,107

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Dalam uji heteroskedastisitas dengan *Spearman's rho*, suatu variabel dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas ketika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual $> 0,05$ (Priyatno, 2010). Hasil uji heteroskedastisitas untuk model persamaan 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan model persamaan 1 tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2

Correlations	
Kemandirian Daerah	0,696
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,745
Efektivitas Keuangan	0,460
Politik Dinasti	0,675
Jumlah Pelanggaran SPI	0,934
KK*KD	0,703
KK*KP	0,359
KK*PD	0,794

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk model persamaan 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan model persamaan 2 tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil uji nilai F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan (Uji Nilai F) Persamaan 1

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53,617	6	8,936	12,642	0,000
Residual	129,351	183	0,707		
Total	182,968	189			

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Uji F dalam analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Dalam uji F, variabel independen dinyatakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketika nilai signifikansi $< \alpha 0,05$. Hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.11 menggambarkan bahwa hasil pengujian memiliki nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, dan jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (Uji Nilai F) Persamaan 2

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	57,647	8	7,206	10,407	0,000
Residual	125,322	181	0,692		
Total	182,968	189			

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.12 menggambarkan bahwa hasil pengujian memiliki nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal, kemandirian daerah yang dimoderasi oleh kinerja, ketergantungan pada pemerintah pusat yang dimoderasi oleh kinerja, dan politik dinasti yang dimoderasi oleh kinerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) Persamaan 1

<i>Model Summary^b</i>	
<i>Adjusted R Square</i>	0,270

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Nilai *R Square* pada tabel *Model Summary* merupakan nilai yang menunjukkan persentase kecocokan model, atau nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,270, artinya variabel independen yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal, dan kinerja dapat menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 27%, sedangkan 73% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) Persamaan 2

<i>Model Summary^b</i>	
<i>Adjusted R Square</i>	0,285

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,286, artinya variabel independen kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal, kemandirian daerah yang dimoderasi kinerja, ketergantungan pada pemerintah pusat yang dimoderasi kinerja, dan politik dinasti yang dimoderasi kinerja dapat menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pelaporan

keuangan pemerintah daerah sebesar 28,5%. Sedangkan 71,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

c. Uji Parsial (Uji T)

Hasil uji parsial (uji T) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Parsial (Uji T) Persamaan 1

Model	<i>Unstandardized</i>	Sig.
	<i>Coefficients</i>	
	B	
<i>(Constant)</i>	4,300	0,000
Kemandirian Daerah	0,577	0,462
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	-0,961	0,046
Efektivitas Keuangan	0,019	0,491
Politik Dinasti	-0,746	0,000
Jumlah Pelanggaran SPI	-0,045	0,027
Kinerja	0,358	0,010

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan signifikansi nilai α 0,05. Suatu hipotesis akan terdukung apabila nilai sig < α 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis. Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$AK = 4,300 + 0,577 KD - 0,961 KP + 0,019 EK - 0,746 PD - 0,045 SPI + 0,358 KK + e$$

1) Uji Hipotesis 1

Dalam uji parsial, hipotesis dinyatakan terdukung apabila nilai sig < 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah memiliki nilai sig $0,462 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $0,577$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (**H₁**) **tidak terdukung**.

2) Uji Hipotesis 2

Hipotesis kedua menyatakan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 4.15, variabel ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai sig $0,046 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,961$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (**H₂**) **terdukung**.

3) Uji Hipotesis 3

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa efektivitas keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 4.15, variabel efektivitas keuangan memiliki nilai sig $0,491 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $0,19$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (**H₃**) **tidak terdukung**.

4) Uji Hipotesis 4

Hipotesis keempat menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 4.15, variabel politik dinasti memiliki nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,746$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (**H₄**) **terdukung**.

5) Uji Hipotesis 5

Hipotesis kelima menyatakan bahwa jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 4.15, variabel jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal memiliki nilai sig $0,027 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,045$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (**H₅**) **terdukung**.

Tabel 4.16
Hasil Uji Parsial (Uji T) Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
	B	
(Constant)	5,293	0,000
Kemandirian Daerah	-3,367	0,432
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	-2,017	0,001
Efektivitas Keuangan	0,018	0,507
Politik Dinasti	-1,271	0,079
Jumlah Pelanggaran SPI	-0,042	0,040
KK*KD	1,368	0,341
KK*KP	0,314	0,019

KK*PD	0,207	0,412
-------	-------	-------

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Persamaan 2 akan menguji pengaruh variabel moderasi.

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$AK = 5,293 - 3,367 KD - 2,017 KP + 0,018 EK - 1,271 PD - 0,042$$

$$SPI + 1,368 KK*KD + 0,314 KK*KP + 0,207 KK*KP + e$$

1) Uji Hipotesis 6

Hipotesis keenam menyatakan bahwa kinerja mampu memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 4.16, variabel kemandirian daerah yang dimoderasi variabel kinerja memiliki nilai sig $0,341 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 1,368. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (**H₆**) **tidak terdukung.**

2) Uji Hipotesis 7

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa kinerja mampu memoderasi hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 4.16, variabel ketergantungan pada pemerintah pusat yang dimoderasi variabel kinerja memiliki nilai sig $0,019 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,314. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (**H₇**) **terdukung.**

3) Uji Hipotesis 8

Hipotesis delapan menyatakan bahwa kinerja mampu memoderasi hubungan politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 4.16, variabel politik dinasti yang dimoderasi variabel kinerja memiliki nilai sig $0,412 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,207. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedelapan (**H₈**) **tidak terdukung**.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, politik dinasti, dan jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel kinerja sebagai variabel moderasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012-2013. Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel ketergantungan pada pemerintah pusat, politik dinasti, dan jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kemandirian daerah dan efektivitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, variabel kinerja sebagai variabel moderasi hanya mampu memoderasi hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak mampu memoderasi hubungan kemandirian daerah dan politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kemandirian daerah (H_1) menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_1 tidak terdukung. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan potensi daerahnya yang menyebabkan daerah memiliki nilai kemandirian yang rendah. Karena kemandirian daerah yang rendah tersebut, pada akhirnya variabel kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi secara baik adalah daerah memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menggali sumber keuangan, mengelola, dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Halim, 2001). Kemandirian daerah yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah memperoleh akuntabilitas keuangan yang baik melalui opini audit yang baik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kemandirian daerah di Indonesia pada tahun 2013-2015 memiliki rata-rata yang relatif rendah yaitu 12%. Angka ini tidak

sebanding dengan rata-rata ketergantungan pada pemerintah pusat di Indonesia pada tahun 2013-2015 yaitu 58%. Artinya, pemerintah daerah belum bisa secara mandiri dalam membiayai proses penyelenggaraan pemerintahannya dan masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

Kemandirian daerah yang rendah tersebut dapat terjadi karena sumber penerimaan strategis lebih banyak dikuasai oleh pusat. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selain itu, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akibatnya, sumber penerimaan strategis seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta penerimaan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas (migas) menjadi sumber penerimaan pendapatan bagi pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mengelola sumber penerimaan nonstrategis seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan.

Padahal, dalam kenyataannya, ketersediaan fasilitas, sarana, serta prasarana yang ada di daerah yang menjadi kontribusi pendapatan asli daerah dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah masih terbatas. Hal ini menyebabkan sulitnya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerahnya, sehingga berdampak pada rendahnya

kemandirian daerah. Kemandirian daerah yang rendah ini mengakibatkan variabel kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purbasari dan Bawono (2017) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Purbasari dan Bawono (2017) menyatakan bahwa kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya, menyebabkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat, yang akhirnya mengakibatkan pemerintah daerah merasa tidak memiliki tanggungjawab dalam melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan PAD. Hal tersebut berdampak pada pemerintah daerah yang tidak mementingkan akuntabilitas pelaporan keuangan dari sisi desentralisasi fiskal.

b. Pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel ketergantungan pada pemerintah pusat (H_2) menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya jaminan dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan bergantung pada dana transfer tersebut dan tidak mengoptimalkan sumber pendanaan yang bisa dihasilkan dari daerahnya. Dana pusat yang

besar akan berkorelasi negatif dengan peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh dana pusat yang besar akan cenderung lebih malas dalam memperoleh pendanaan sendiri melalui PAD. Hal ini sesuai dengan data dalam penelitian ini, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata variabel ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 58%. Angka tersebut dapat dikatakan tidak sebanding dengan rata-rata kemandirian daerah yang hanya sebesar 12%.

Dalam teori *stewardship* dijelaskan bahwa para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principle*, selain itu *steward* cenderung tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya tersebut. Tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa pemerintah daerah selaku *steward* belum mampu mencapai sasaran organisasinya secara maksimal. Hal ini yang menyebabkan pemerintah daerah cenderung kurang dalam memberikan akuntabilitas publik. Semakin kecilnya proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, atau semakin besar PAD suatu daerah, maka hal itu akan berdampak pada kelancaran mobilisasi dari dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Ariansyah et al., 2004). Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lancar, akan mendukung untuk terciptanya akuntabilitas yang baik (Mudhofar dan Tahar, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014) yang menemukan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Artinya, semakin tinggi ketergantungan pada pemerintah pusat maka akan semakin kecil kemungkinan daerah tersebut memperoleh akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik.

c. Pengaruh Efektivitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel efektivitas keuangan (H_3) menunjukkan bahwa efektivitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dapat terjadi karena dalam proses pencapaian PAD banyak hal-hal yang mempengaruhi realisasi PAD tersebut, seperti kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta perubahan kebijakan dan kepentingan publik. Kondisi ini sering dikaitkan dengan ketidakpastian lingkungan yang menyebabkan ambiguitas kerja yang akan mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah (Wijaya dan Akbar, 2013).

Selain itu, penggunaan rasio keuangan misalnya saja rasio efektivitas keuangan pada organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah masih belum banyak dilakukan jika dibandingkan dengan organisasi sektor privat (Pramono, 2014). Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah yang sifat

serta cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan organisasi sektor privat. Selain itu, penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada struktur APBD. Belum lazimnya penggunaan rasio keuangan dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah ini menyebabkan efektivitas keuangan tidak dijadikan tolak ukur akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar dan Tahar (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas realisasi PAD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

d. Pengaruh Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel politik dinasti (H_4) menunjukkan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Daerah yang menjalankan praktik politik dinasti cenderung memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang rendah jika dibandingkan dengan daerah yang tidak menjalankan praktik politik dinasti. Teori pilihan publik menyatakan bahwa pejabat terpilih serta birokrat pemerintah yang mengaku mengutamakan kepentingan umum dalam proses pemungutan

suara, justru seringkali menggunakan sektor publik untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka (Schneider dan Damanpour, 2002). Untuk mencapai kepentingan pribadi mereka, birokrat akan senantiasa menyusun program dengan penganggaran yang tidak sesuai dan berupaya untuk terus meningkatkan kekuatan serta pengaruh mereka. Karena motivasi tersebut, pejabat pemerintahan berusaha untuk terus mempertahankan kekuasaannya salah satunya melalui politik dinasti.

Keberadaan politik dinasti akan membatasi munculnya calon alternatif bagi rakyat karena politik dinasti memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menang dalam pemilihan umum. Dengan kata lain, fenomena politik dinasti akan menurunkan partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah karena rakyat dihadapkan pada pilihan aktor-aktor politik yang itu-itu saja, bahkan berasal dari satu keluarga. Terbatasnya calon alternatif bagi rakyat menyebabkan rendahnya kualitas calon kepala daerah sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan dana publik serta akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena pada prinsipnya, suksesi kepemimpinan dalam praktik politik dinasti tidak berdasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas melainkan bertumpu pada hubungan darah (Prianto, 2016). Prianto (2016) menyatakan bahwa jaringan kekuasaan keluarga atau kekerabatan akan membentuk sebuah oligarki politik dan menimbulkan rezim absolut yang kekuasaannya sulit dikontrol di daerah. Ketiadaan profesionalitas dan

kontrol yang memadai mampu memunculkan penyakit birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di daerah mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena laporan keuangan cenderung disusun tidak berdasarkan pada realitas yang terjadi. Yang pada akhirnya, BPK tidak akan memberikan opini audit yang baik ketika menemukan adanya kejanggalan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo dan Rossieta (2014) serta Anggraini dan Riharjo (2017) yang menemukan bahwa praktik politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

e. Pengaruh Jumlah Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal (H_5) menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, semakin banyak jumlah pelanggaran/temuan sistem pengendalian internal, maka semakin rendah akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam teori *stewardship* dinyatakan bahwa *steward* akan berusaha untuk memenuhi kepentingan *principle*. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah daerah selaku *steward* dituntut untuk mampu memenuhi

kepentingan *principle* yaitu masyarakat dan DPRD, salah satunya melalui akuntabilitas publik. Jumlah sistem pengendalian internal merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian BPK mengenai pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK terhadap LKPD sendiri menunjukkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana, semakin banyak jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal yang dilakukan, maka akan semakin rendah opini yang diberikan BPK terhadap LKPD. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik mampu menjamin kualitas serta kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan karena tindakan pengendalian internal tersebut akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, pengendalian internal yang layak diperlukan sebagai salah satu metode dalam mencegah terjadinya penipuan dan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Kesalahan karena catatan yang tidak akurat atau catatan yang tidak lengkap mengindikasikan bahwa entitas pemerintah tidak menunjukkan gambaran nyata dari status keuangan mereka dan laporan keuangan mungkin memiliki salah saji material (David, 2017). Jika sistem pengendalian internal ditingkatkan, penemuan kelemahan/ pelanggaran sistem pengendalian internal akan lebih rendah dan ini akan menghasilkan opini yang baik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purbasari dan Bawono (2017) dan Rasmini dan Masdianti (2018) yang menemukan bahwa jumlah temuan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

f. Pengaruh Kinerja dalam Memoderasi Hubungan Kemandirian Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel interaksi kinerja dan kemandirian daerah (H_6) menunjukkan bahwa kinerja tidak dapat memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena dengan adanya pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri, justru kewenangan tersebut seringkali disalahgunakan dan cenderung akan terjadi penyelewengan sumber pendapatan. Hal ini menyebabkan kinerja pemerintah daerah tidak dapat dicapai secara maksimal. Berdasarkan data penelitian, rata-rata kemandirian daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih tergolong kecil yaitu sebesar 12%. Sedangkan rata-rata skor kinerja sendiri mencapai angka 2,823496 yang mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah yang sudah bagus karena masuk dalam kategori tinggi (skor 2–3). Artinya, kinerja yang baik tidak menjamin tercapainya kemandirian daerah yang tinggi, yang pada akhirnya kinerja tidak mampu

memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rendahnya kemandirian daerah disebabkan karena sumber penerimaan strategis yang dikuasai oleh pemerintah pusat. Seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta pendapatan sumber daya alam misalnya minyak bumi dan gas. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mengelola sumber penerimaan nonstrategis seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memaksimalkan potensi sumber keuangan yang ada di daerahnya, sekalipun ditunjang dengan inerja yang baik. Yang pada akhirnya, kemandirian daerah yang rendah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014) serta Mudhofar dan Tahar (2017) yang menemukan interaksi antara kemandirian daerah dan kinerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

g. Pengaruh Kinerja dalam Memoderasi Hubungan Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel interaksi kinerja dan ketergantungan pada pemerintah pusat (H_7) menunjukkan bahwa kinerja dapat memoderasi hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, kinerja pemerintah daerah mampu memperlemah pengaruh negatif ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan tetap baik ketika pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat mampu mengoptimalkan kinerjanya. Dalam teori *stewardship*, *steward* akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Kinerja yang baik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan, salah satunya adalah mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur melalui perspektif finansial saja tetapi juga dari perspektif non finansial. Sehingga, ketika aspek finansial, misalnya dana transfer dari pemerintah pusat yang tinggi dan PAD yang rendah, masih terdapat aspek kinerja non finansial yang akan mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik misalnya saja kinerja pegawai yang dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut mendapatkan nilai akuntabilitas pelaporan

keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella dan Rossieta, 2014). Sehingga dalam hal ini, kinerja dinilai mampu memperlemah efek negatif dari hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014) serta Mudhofar dan Tahar (2017) yang menyatakan bahwa kinerja sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap hubungan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

h. Pengaruh Kinerja dalam Memoderasi Hubungan Politik Dinasti dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel interaksi kinerja dan politik dinasti (H_8) menunjukkan bahwa kinerja tidak dapat memoderasi hubungan politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, kinerja tidak dapat memperlemah efek negatif dari politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tetapi juga tidak dapat memperkuat efek negatif dari politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, politik dinasti diartikan sebagai perpindahan maupun perluasan kekuasaan dalam level eksekutif (kepala daerah) yang dilakukan dalam suatu keluarga (baik sedarah maupun semenda). Politik dinasti yang terjadi pada level eksekutif ini akan memunculkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang terjadi di daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan disusun tidak berdasarkan realita yang terjadi. Sehingga BPK tidak akan memberikan opini audit yang baik ketika menemukan adanya kejanggalan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, kinerja tidak akan berpengaruh terhadap opini yang diberikan BPK ketika laporan keuangan terbukti terjadi manipulasi dan terdapat kejanggalan dalam proses pelaporannya sebagai dampak dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Berdasarkan data penelitian, daerah yang mendapatkan skor EKPPD yang tinggi belum tentu mendapatkan opini audit yang baik dari BPK. Misalnya saja Kota Tangerang Selatan tahun 2014 yang terindikasi politik dinasti mendapatkan skor EKPPD tinggi yaitu 2,7107 tetapi mendapatkan opini audit WDP dengan skor 3. Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2014 yang tidak terindikasi politik dinasti mendapatkan skor EKPPD rendah yaitu 1,6874 tetapi mendapatkan opini audit WTP dengan skor 5. Hal ini membuktikan bahwa, kinerja tidak mampu memoderasi hubungan politik dinasti dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.